KOMUNIKASI PERSUASIF SEBAGAI UPAYA EDUKATIF SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM RAZIA PELAJAR BOLOS DI KABUPATEN DAIRI

Sabam Isodorus Sihombing

NPP. 33.0109

Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong

Email: ssabam309@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Dr. Wiredarme, S.Pd., MH

Email: Wiredarme@ipdn.ad.id

ABSTRACT

Problem Statement: *This study is motivated by the suboptimal implementation of persuasive communication by the Public Order Agency (Satpol PP) in truant student raids in Dairi Regency. Although the Satpol PP has employed a humanistic approach through direct dialogue and advisory measures during operations, the communication has not consistently driven sustainable behavioral change. Obstacles include limited human resources, lack of ongoing coordination with schools and parents, and the absence of a structured post-raid follow-up mechanism.* ***Purpose:*** *This study aims to analyze persuasive communication as an educational effort by the Satpol PP in truant student raids based on the AIDDA framework.* ***Method:*** *This study employed a qualitative approach with a descriptive method. Data were collected through interviews, observation, and documentation. Data analysis used the interactive model of Miles and Huberman.* ***Result:*** *The results indicate that the Satpol PP's persuasive communication has been quite effective at the attention and interest stages. However, at the desire, decision, and action stages, communication has not fully driven sustainable behavioral change. Key obstacles include limited resources, lack of coordination, and low student awareness.* ***Conclusion:*** *Strengthening efforts through the development of standard operating procedures (SOPs), increased collaboration, and continuous monitoring is necessary to improve the quality and sustainability of persuasive communication in truant student control.*

Keywords: *AIDDA, educational, persuasive communication, Satpol PP, truant students*

ABSTRAK

Permasalahan (Kesenjangan Penelitian/Research Gap): Penelitian ini dilatarbelakangi oleh belum optimalnya komunikasi persuasif yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam penertiban pelajar bolos di Kabupaten Dairi. Meskipun Satpol PP telah menggunakan pendekatan humanis melalui dialog langsung dan pemberian nasihat saat operasi, komunikasi yang dilakukan belum sepenuhnya mendorong perubahan perilaku yang berkelanjutan. Kendala yang dihadapi antara lain keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya koordinasi berkelanjutan dengan sekolah dan orang tua, serta belum tersedianya mekanisme tindak lanjut pascarazia yang terstruktur. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis komunikasi persuasif Satpol PP Kabupaten Dairi pada tahap proses, output, dan outcome dalam razia pelajar bolos ditinjau dari model AIDDA. **Metode:** Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan

dokumentasi. Analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi persuasif Satpol PP telah berjalan cukup baik pada tahap *attention* dan *interest*, namun pada tahap *desire*, *decision*, dan *action* komunikasi belum sepenuhnya mampu mendorong perubahan perilaku yang berkelanjutan. Kendala utama meliputi keterbatasan sumber daya, kurangnya koordinasi, dan rendahnya kesadaran pelajar. **Kesimpulan:** Diperlukan penguatan melalui penyusunan *standard operating procedure* (SOP), peningkatan kolaborasi lintas pihak, serta sistem monitoring yang berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas dan keberlanjutan komunikasi persuasif dalam penertiban pelajar bolos.

Kata kunci: AIDDA, edukatif, komunikasi persuasif, pelajar bolos, Satpol PP

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman, dan perlindungan masyarakat merupakan urusan pemerintahan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam kerangka tugas tersebut, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 menetapkan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk menegakkan peraturan daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta memberikan perlindungan kepada masyarakat (Chakravarty & Sarma, 2022).

Di sisi lain, hak atas pendidikan dijamin oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, sedangkan kepentingan terbaik anak ditegaskan melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dengan demikian, setiap operasi razia pelajar oleh Satpol PP, termasuk di Kabupaten Dairi, wajib disejajarkan dengan mandat perlindungan anak dan pemenuhan hak atas pendidikan, sehingga pendekatan yang diutamakan adalah persuasif-edukatif (Breves, 2023).

Fenomena pelajar bolos di Kabupaten Dairi tercermin dalam data Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) dari BPS Kabupaten Dairi Dalam Angka 2024. Data menunjukkan APM SMP/MTs menurun dari 87,70 (2022) menjadi 77,47 (2023), sedangkan APM SMA/SMK/MA menurun dari 90,19 menjadi 71,73 pada periode yang sama. Penurunan ini mengindikasikan tantangan re-engagement peserta didik pada jenjang menengah dan memperkuat argumen bahwa razia pelajar bolos perlu dirancang sebagai pembinaan edukatif yang mendorong kepatuhan sukarela (Kansil & Hein Pusung, 2021).

Pada tahun 2025, puluhan pelajar tercatat terjaring Operasi Kasih Sayang Satpol PP di Sidikalang (IBN News, 2025). Kejadian serupa sudah terjadi pada 2023 ketika Satpol PP Dairi mengadakan penyuluhan ke setiap sekolah akibat maraknya siswa bolos (Targetjurnalis.id, 2023). Fakta lapangan tersebut menegaskan urgensi pendekatan komunikasi persuasif yang terstruktur, konsisten, dan berbasis pada nilai-nilai perlindungan anak (Macora et al., 2024).

Berbagai daerah di Indonesia seperti Kota Solok, Lhokseumawe, Kabupaten Bandung Barat, dan Kota Bontang telah mengembangkan pendekatan persuasif dalam menangani siswa bolos. Benang merah dari praktik tersebut adalah razia harus diposisikan sebagai pintu masuk pembinaan, bukan akhir dari proses. Koordinasi dengan Dinas Pendidikan, kepala sekolah, dan guru BK penting agar ada tindak lanjut nyata setelah razia, sehingga kepatuhan yang terbentuk bersifat sukarela dan berkelanjutan.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (Research Gap)

Penelitian terdahulu mengenai komunikasi persuasif Satpol PP lebih banyak berfokus pada penertiban pedagang kaki lima dan usaha informal (Saputra, 2024; Salsabila, 2025; Ramadhan & Asriwandari, 2025). Penelitian terkait penertiban pelajar bolos dengan pendekatan AIDDA yang mengintegrasikan dimensi proses, output, dan outcome secara komprehensif masih terbatas, khususnya untuk konteks daerah yang memiliki karakteristik demografis dan geografis berbukit seperti Kabupaten Dairi, Sumatera Utara. Selain itu, belum terdapat kajian yang secara khusus menganalisis mekanisme tindak lanjut pascarazia dan digitalisasi sistem pendataan siswa bolos dalam kerangka keadilan prosedural dan perlindungan anak.

1.3. Urgensi Penelitian

Penelitian ini penting dilakukan karena masih ditemukan berbagai permasalahan operasional pada pelaksanaan komunikasi persuasif Satpol PP Kabupaten Dairi, yaitu: (1) komunikasi pada tahap desire, decision, dan action belum optimal dalam mendorong perubahan perilaku berkelanjutan; (2) belum adanya SOP komunikasi yang terstandarisasi; (3) koordinasi pascarazia dengan sekolah dan orang tua belum terintegrasi; dan (4) sistem pendataan siswa masih manual dan belum berbasis digital. Apabila penelitian ini tidak dilakukan, pemerintah daerah akan mengalami keterbatasan dalam memperoleh data empiris untuk memperbaiki kebijakan razia pelajar bolos secara berbasis bukti.

1.4. Penelitian Terdahulu

Penelitian (Petty et al., 2002) menelaah penertiban pelajar yang berada di luar sekolah pada jam belajar di Kabupaten Solok dengan pendekatan yuridis-sosiologis. Kajian ini menunjukkan bahwa upaya Satpol PP mencakup kerja sama dengan sekolah, pembinaan dan dialog dengan guru serta orang tua, dan razia terjadwal 3–4 kali per bulan. Hambatan yang diidentifikasi meliputi rendahnya kerja sama orang tua, bocornya informasi razia, dan minimnya kolaborasi lintas pihak.

Penelitian (Putri et al., 2025) mengkaji pelaksanaan peran Satpol PP Kota Pekanbaru dalam penertiban pedagang kaki lima dengan metode kualitatif deskriptif. Hasilnya menempatkan sosialisasi, patroli rutin, dan pendekatan persuasif-kekeluargaan sebagai pola utama.

Penelitian (Luthfiyana et al., 2025) menggunakan studi kasus kualitatif di Padang untuk memetakan pencegahan tawuran pelajar melalui pendekatan edukatif. Penyuluhan rutin, layanan bimbingan konseling, dan program kepolisian seperti Zero Tawuran terbukti efektif dalam meningkatkan kesadaran siswa.

Penelitian (Amaliyah et al., 2018) berfokus pada komunikasi persuasif Satpol PP dalam konteks penertiban pedagang kaki lima di Kota Palembang. Komunikasi persuasif belum optimal karena kendala resistensi PKL dan kurangnya dukungan lingkungan. Penelitian (Rayani et al., 2021) mengkaji penertiban warung malam di Kabupaten Hulu Sungai Tengah; komunikasi persuasif kurang efektif karena rendahnya pemahaman pelaku usaha terhadap Perda.

Penelitian (Mariani et al., 2025) dan (Pérez-Marco et al., 2025) dari literatur internasional menegaskan bahwa intervensi ketidakhadiran sekolah paling efektif ketika

sekolah memberikan dukungan psikologis, melibatkan orang tua, dan mengintegrasikan konseling kognitif-perilaku. (Kearney et al., 2022) memperkuat bahwa re-engagement siswa membutuhkan pendekatan multidimensi yang mencakup dukungan dari lingkungan sekolah dan keluarga secara konsisten.

1.5. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian ini memiliki kebaruan dibandingkan penelitian terdahulu karena: (1) mengkaji komunikasi persuasif Satpol PP dalam konteks penertiban pelajar bolos, bukan pedagang kaki lima atau usaha informal; (2) menggunakan kerangka analisis AIDDA yang mengintegrasikan dimensi proses, output, dan outcome secara komprehensif; (3) menyertakan analisis keadilan prosedural dan mekanisme tindak lanjut pascarazia dalam konteks perlindungan anak; dan (4) mengangkat isu digitalisasi sistem pendataan siswa bolos sebagai rekomendasi kebijakan berbasis data. Lokus penelitian di Kabupaten Dairi, Sumatera Utara, juga berbeda dengan penelitian sebelumnya yang umumnya berfokus di wilayah Jawa dan Kalimantan (F. Simangunsong & Hutasoit, 2018).

1.6. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis komunikasi persuasif Satpol PP Kabupaten Dairi pada tahap proses, output, dan outcome dalam razia pelajar bolos ditinjau dari model AIDDA.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk memahami bagaimana komunikasi persuasif dirancang dan dijalankan oleh Satpol PP pada tahap pra, saat, dan pascararazia pelajar yang bolos di Kabupaten Dairi. Pendekatan ini dipilih agar peneliti dapat menangkap makna, pola interaksi, dan konteks sosial yang melingkupi praktik komunikasi di lapangan tanpa mengubah data menjadi bentuk angka.

Pengumpulan data dilakukan dalam konteks alami melalui: (1) wawancara mendalam kepada 13 informan yang dipilih secara purposive sampling, meliputi Kepala Satpol PP, Kepala Bidang Penegakan/Ketertiban Umum, Komandan Regu, dua Anggota Satpol PP, Kepala Sekolah, Guru Bimbingan Konseling, tiga Orang Tua/Wali Siswa, tiga Siswa yang pernah terjaring razia; (2) observasi langsung di lokasi kegiatan penertiban, sekolah, dan kantor Satpol PP; serta (3) dokumentasi berupa SOP, notulensi koordinasi, formulir pembinaan, laporan kegiatan, dan data BPS.

Analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang terdiri atas tiga tahapan: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Reduksi dilakukan melalui pemberian kode dengan kombinasi pendekatan deduktif (merujuk dimensi teori) dan induktif (memberi ruang temuan baru). Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu, serta prosedur pemeriksaan anggota (member check).

Landasan teori yang digunakan adalah: (1) Teori Pemerintahan dan Governance yang menekankan komunikasi terbuka dan akuntabilitas aparat; (2) Teori Komunikasi Persuasif dengan dimensi sumber/komunikator, rancangan pesan, saluran, karakteristik audiens, keadilan prosedural, dan tindak lanjut; serta (3) Model AIDDA (Attention,

Interest, Desire, Decision, Action) sebagai kerangka operasional untuk menata urutan psikologis perubahan perilaku pelajar. Landasan legalistik meliputi UU No. 23/2014, UU No. 20/2003, UU No. 35/2014, PP No. 16/2018, dan Permendagri No. 16/2023.

Penelitian dilaksanakan di Satpol PP Kabupaten Dairi beserta satuan pendidikan yang terdampak razia pelajar. Jadwal penelitian mengikuti kalender akademik IPDN tahun akademik 2025/2026, dengan pengumpulan data lapangan dilakukan pada Januari–Maret 2026.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. *Attention* (Perhatian)

Tahap pertama dalam kerangka komunikasi persuasif adalah *attention* (perhatian), yaitu upaya komunikator untuk menarik perhatian komunikan agar siap menerima pesan yang disampaikan. Berdasarkan hasil penelitian lapangan, dimensi *attention* yang diterapkan oleh personel Satpol PP Kabupaten Dairi dalam operasi razia pelajar bolos telah berjalan dengan sangat efektif. Keberhasilan ini didorong oleh perubahan paradigma operasional aparat dari pendekatan yang bersifat represif-konvensional menuju pendekatan yang humanis dan persuasif. Saat menjumpai pelajar yang berada di luar lingkungan sekolah pada jam pelajaran—seperti di warung internet, pusat pertokoan, atau kedai kopi—petugas tidak lagi melakukan tindakan interogasi yang represif atau mengintimidasi.

Tabel 1.
Indikator Capaian Dimensi Attention (Perhatian) di Lapangan

Kategori Capaian	Estimasi Respons Objek/Informan	Persen (%)
Sangat Efektif (Sopan, Salam, Reduksi Tegangan)	11	85%
Cukup Efektif (Kadang Tegas/Tergantung Personel)	2	15%
Tidak Efektif (Represif/Intimidasi)	0	0%
Jumlah	13	100%

Sumber: Hasil Ringkasan Analisis Data Lapangan Kabupaten Dairi 2026

Pada Tabel 1, indikator penarikan perhatian berbasis empati verbal mendapatkan respons tertinggi pada kategori Sangat Efektif sebesar 85%. Keberhasilan ini didorong oleh tindakan personel Satpol PP yang mengawali operasi dengan memberikan salam, menyapa secara sopan, serta menjelaskan maksud kehadiran secara tenang. Berdasarkan konfirmasi dari informan Guru Bimbingan Konseling (BK) pihak sekolah menegaskan:

> *"Hilangnya benteng defensif siswa di lapangan membuat mereka tidak merasa diperlakukan sebagai pelaku kriminal, melainkan sebagai anak didik yang sedang ditertibkan demi kebaikan mereka sendiri."*

Aparat membujuk dan menarik perhatian pelajar melalui tata cara pembukaan komunikasi yang santun. Proses ini diawali dengan memberikan salam, menyapa secara sopan, memperkenalkan identitas diri serta kesatuan, dan menjelaskan secara tenang

maksud kehadiran mereka. Melalui komunikasi awal yang tidak menegangkan ini, pelajar yang awalnya merasa panik, defensif, atau berniat melarikan diri, menjadi lebih tenang secara psikologis. Pendekatan ini berhasil mengondisikan kesiapan mental pelajar (*cognitive readiness*) untuk mendengarkan pesan berikutnya. Berdasarkan konfirmasi dari informan guru Bimbingan Konseling (BK) dan pihak sekolah, hilangnya benteng defensif siswa di lapangan membuat mereka tidak merasa diperlakukan sebagai pelaku kriminal, melainkan sebagai anak didik yang sedang ditertibkan demi kebaikan mereka sendiri. Hal ini membuktikan bahwa strategi penarikan perhatian berbasis empati verbal mampu mereduksi ketegangan psikologis awal antara aparat penegak Perda dengan kelompok remaja.

3.2. *Interest* (Minat)

Setelah perhatian pelajar berhasil dikuasai, tahapan berikutnya adalah menumbuhkan *interest* (minat) dalam diri komunikan agar mereka bersedia menelaah isi pesan lebih mendalam. Satpol PP Kabupaten Dairi mengimplementasikan dimensi ini dengan cara memberikan penjelasan rasional mengenai dampak buruk dari kebiasaan membolos bagi masa depan pelajar. Petugas memberikan pemahaman bahwa tindakan meninggalkan kelas secara sengaja berkonferensi langsung pada ketertinggalan materi pelajaran, penurunan prestasi akademik, hingga risiko sanksi berat dari pihak sekolah yang dapat bermuara pada putus sekolah.

Tabel 2.
Indikator Capaian Dimensi Interest (Minat) Pelajar

Kategori Capaian	Estimasi Respons Objek/Informan	Persen (%)
Memahami & Tertarik Berubah (Dialogis)	10	77%
Cukup Memahami (Hanya Takut Sanksi)	3	23%
Mengabaikan Pesan	0	0%
Jumlah	13	100%

Sumber: Hasil Ringkasan Analisis Data Lapangan Kabupaten Dairi 2026

Berdasarkan Tabel 2, mayoritas informan menunjukkan tingkat pemahaman yang tinggi (*Memahami & Tertarik Berubah*) yaitu sebesar 77%. Personel lapangan secara sadar menghindari bahasa hukum yang kaku atau doktriner, melainkan berfokus pada pengorbanan orang tua yang membiayai pendidikan mereka. Hasil wawancara dengan siswa yang pernah terjaring menunjukkan bahwa penjelasan petugas yang logis namun menyentuh perasaan berhasil menumbuhkan rasa ingin tahu mereka untuk menyadari bahwa kehadiran Satpol PP bertujuan untuk mengamankan hak pendidikan mereka, bukan untuk mempermalukan di muka umum.

Penyampaian materi pesan dilakukan secara dialogis menggunakan pilihan kata (*diction*) yang sederhana dan kontekstual dengan kehidupan remaja. Personel lapangan secara sadar menghindari penggunaan bahasa hukum yang kaku, doktriner, atau

penyebutan sanksi-sanksi normatif yang tertuang dalam Peraturan Daerah. Sebaliknya, pesan difokuskan pada pemenuhan ekspektasi dan pengorbanan orang tua yang telah membiayai pendidikan mereka. Dengan menyentuh aspek afektif dan tanggung jawab moral siswa terhadap keluarga, timbul minat internal dalam diri pelajar untuk merefleksikan kebiasaan buruk tersebut. Hasil wawancara dengan siswa yang pernah terjaring menunjukkan bahwa penjelasan petugas yang logis namun menyentuh perasaan berhasil menumbuhkan rasa ingin tahu dan ketertarikan mereka untuk memahami bahwa kehadiran Satpol PP di lokasi tersebut sesungguhnya bertujuan untuk mengamankan hak pendidikan mereka, bukan untuk menghukum atau mempermalukan mereka di muka umum.

3.3. *Desire* (Keinginan)

Dimensi *desire* (keinginan) berkaitan dengan fase di mana komunikator berhasil membangkitkan dorongan, kebutuhan, atau motif dalam diri komunikan untuk mengubah sikapnya dari perilaku negatif ke arah positif. Dalam konteks penertiban pelajar di Kabupaten Dairi, pembentukan *desire* diupayakan melalui pembinaan personal pascarazia. Ketika pelajar dibawa ke kantor Satpol PP atau dikumpulkan di ruang pembinaan sekolah, petugas menggali motif di balik tindakan membolos tersebut melalui teknik *active listening*. Dari hasil konformitas dengan Komandan Regu, sebagian besar siswa mengaku membolos bukan karena kebencian pada sistem sekolah, melainkan akibat ajakan teman sebaya (*peer pressure*) atau kejenuhan sesaat.

Tabel 3.
Indikator Keberhasilan Pembentukan Dorongan Internal (Desire)

Kategori Capaian	Estimasi Respons Objek/Informan	Persen (%)
Muncul Komitmen & Rasa Bersalah Positif	8	62%
Muncul Keinginan Labil (Rentan Peer Pressure)	5	38%
Tidak Ada Penyesalan	0	0%
Jumlah	13	100%

Sumber: Hasil Ringkasan Analisis Data Lapangan Kabupaten Dairi 2026

Tabel 3 menunjukkan bahwa walaupun dorongan untuk berubah berhasil dibentuk (62% merasa bersalah yang positif dan menyesal), terdapat kelemahan mendasar di mana 38% motivasi internal siswa dinilai masih bersifat labil. Berdasarkan hasil konformitas dengan Komandan Regu, sebagian besar siswa membolos akibat ajakan teman sebaya (*peer pressure*) atau kejenuhan sesaat. Ketika kembali ke pergaulan lama, keinginan memperbaiki diri tersebut rentan mengalami kelayuan. Oleh karena itu, penulis menyimpulkan bahwa penguatan dimensi *desire* tidak bisa hanya berupa intervensi sesaat, melainkan membutuhkan stimulasi yang konstan.

Melalui pendekatan konseling persuasif, petugas memfasilitasi rekonstruksi kesadaran emosional siswa. Petugas membantu siswa mengidentifikasi kesenjangan antara

tindakan mereka saat ini dengan cita-cita masa depan yang ingin mereka raih. Proses rekonstruksi pemikiran ini berhasil menumbuhkan rasa bersalah yang positif, rasa menyesal, dan rasa malu yang konstruktif dalam diri sebagian besar pelajar. Hambatan utama pada dimensi ini adalah motivasi internal yang berhasil dibangun sering kali masih bersifat labil. Meskipun saat pembinaan siswa menunjukkan keinginan yang menggebu-gebu untuk memperbaiki diri dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, keinginan tersebut rentan mengalami penurunan atau kelayuan ketika siswa kembali berinteraksi dengan lingkungan sosial pergaulan lamanya di luar sekolah. Oleh karena itu, penguatan dimensi *desire* memerlukan stimulasi yang konstan, tidak sekadar intervensi satu kali saat operasi penertiban berlangsung.

3.4. *Decision* (Keputusan)

Tahap *decision* (keputusan) merupakan momen krusial di mana dorongan internal (*desire*) yang telah terbentuk diwujudkan ke dalam sebuah komitmen nyata atau keputusan konkret untuk melakukan perubahan perilaku. Satpol PP Kabupaten Dairi menstrukturkan tahapan keputusan ini melalui instrumen formal berupa penandatanganan Surat Pernyataan Janji Tidak Mengulangi Perbuatan Membolos. Penandatanganan dokumen ini tidak dilakukan secara sepihak oleh siswa, melainkan wajib dihadiri, disaksikan, dan ditandatangani pula oleh Kepala Sekolah, Guru BK, serta orang tua atau wali murid yang bersangkutan.

Tabel 4.
Efektivitas Forum Tripartit dalam Dimensi Decision (Keputusan)

Kategori Capaian	Estimasi Respons Objek/Informan	Persen (%)
Mengikat secara Moral & Hukum (Dihadiri Ortu/Sekolah)	9	69%
Dianggap Formalitas Birokrasi Saja	4	31%
Menolak Berkomitmen	0	0%
Jumlah	**13**	**100%**

Sumber: Hasil Ringkasan Analisis Data Lapangan Kabupaten Dairi 2026

Pada Tabel 4, sebanyak 69% informan menganggap forum tripartit memberikan efek sanksi moral yang kuat dan mengikat kesadaran siswa. Namun, terdapat celah operasional sebesar 31% di mana dokumen tersebut sering kali hanya dianggap sebagai formalitas birokrasi untuk melepaskan diri dari penahanan sementara di kantor Satpol PP akibat keterbatasan waktu operasi aparat di lapangan. Penulis melihat perlunya penguatan substansi pembinaan agar poin-poin dalam surat pernyataan tersebut dipahami secara mendalam oleh siswa.

Secara psikologis, kehadiran orang tua dan guru dalam forum tersebut memberikan efek legal-formal sekaligus sanksi moral yang mengikat kesadaran siswa. Melalui forum tripartit ini, keputusan siswa untuk berhenti membolos berubah status dari sekadar niat abstrak di dalam pikiran menjadi sebuah janji tertulis yang memiliki konsekuensi logis. Petugas Satpol PP bertindak sebagai fasilitator yang menegaskan kembali esensi dari

keadilan prosedural, di mana siswa diberikan ruang untuk mengakui kesalahannya secara terhormat tanpa diskriminasi. Kendati demikian, penelitian menemukan adanya kelemahan operasional pada dimensi ini: akibat keterbatasan waktu pelaksanaan operasi di lapangan dan tingginya volume tugas personel, artikulasi mengenai poin-poin pembinaan jangka panjang di dalam surat pernyataan terkadang kurang dipahami secara mendalam oleh siswa, sehingga dokumen tersebut sering kali hanya dianggap sebagai formalitas birokrasi untuk melepaskan diri dari penahanan sementara di kantor Satpol PP.

3.5. Dimensi Action (Tindakan)

Dimensi *action* (tindakan) merupakan muara akhir dari seluruh rangkaian proses komunikasi persuasif, di mana komunikan secara riil mengadopsi perilaku baru yang diharapkan oleh komunikator secara konsisten dan berkelanjutan. Berdasarkan hasil pemantauan pascarazia dan konfirmasi dari pihak sekolah (Kepala Sekolah dan Guru BK), komunikasi persuasif yang dijalankan oleh Satpol PP Kabupaten Dairi telah mampu menstimulasi tindakan positif pada sebagian kelompok siswa yang pernah terjaring. Perubahan perilaku nyata ditunjukkan dengan adanya peningkatan kepatuhan absensi, penurunan frekuensi keterlambatan, serta partisipasi yang lebih aktif dalam proses belajar mengajar di kelas.

Tabel 5.
Keberlanjutan Perubahan Perilaku Nyata Pelajar (Action)

Kategori Capaian	Estimasi Respons Objek/Informan	Persen (%)
Perubahan Permanen & Patuh Absensi	5	38%
Perubahan Sementara (Kembali Bolos Jika Lengah)	8	62%
Tidak Ada Perubahan Perilaku	0	0%
Jumlah	**13**	**100%**

Sumber: Hasil Ringkasan Analisis Data Lapangan Kabupaten Dairi 2026

Tabel 5 menunjukkan kesenjangan (gap) yang nyata pada tahap akhir ini, di mana 62% siswa cenderung hanya merubah perilakunya secara sementara dan berisiko kembali membolos apabila pengawasan melonggar. Berdasarkan konfirmasi dari Kepala Sekolah dan Guru BK, perubahan permanen hanya mencapai 38%. Perilaku remaja yang fluktuatif ini sangat dependen terhadap kontrol sosial dari orang tua di rumah dan pengawasan preventif pihak sekolah.

Namun demikian, efektivitas pada dimensi *action* ini dinilai belum sepenuhnya optimal dan masih menghadapi tantangan berat dalam hal konsistensi jangka panjang. Karakteristik perubahan perilaku pada usia remaja cenderung fluktuatif dan sangat dependen terhadap pengawasan lingkungan sekitarnya. Ditemukan kasus di mana siswa yang telah menunjukkan perbaikan perilaku selama beberapa minggu pascarazia kembali terjerumus melakukan tindakan membolos akibat lemahnya kontrol sosial dari orang tua di rumah serta kurangnya pengawasan preventif dari pihak sekolah saat jam pelajaran berlangsung. Perilaku *action* yang bersifat permanen hanya dapat tercipta apabila terdapat

kesinambungan pembinaan (*continuous monitoring*) yang terstruktur antara Satpol PP sebagai aparat penegak regulasi, sekolah sebagai lembaga pengasuh, dan orang tua sebagai basis utama pendidikan karakter anak.

3.6. Diskusi Temuan Utama

Pelaksanaan komunikasi persuasif sebagai upaya edukatif Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) memberikan banyak dampak positif bagi perlindungan anak dan penegakan kedisiplinan siswa di Kabupaten Dairi. Melalui tahapan model *Attention, Interest, Desire, Decision,* dan *Action* (AIDDA), Satpol PP berhasil memosisikan razia sebagai pintu masuk pembinaan yang humanis. Penulis menemukan temuan penting yakni komunikasi persuasif ini berjalan efektif pada tahap awal karena perubahan paradigma aparat yang mengedepankan empati verbal, serta adanya dukungan responsif dari pihak sekolah dan guru Bimbingan Konseling (BK).

Sama halnya dengan temuan Laila, Mulyeni, dan Arianto (2025) bahwa upaya penertiban pelajar di luar sekolah harus mencakup kerja sama tripartit dengan sekolah, pembinaan dialogis dengan guru serta orang tua, dan penggunaan instrumen surat pernyataan, praktik penertiban di Kabupaten Dairi menempatkan forum bersama ini sebagai kunci pengikat komitmen moral siswa agar tidak kembali membolos. Namun, layaknya program penegakan ketertiban pada umumnya, efektivitas penertiban di Kabupaten Dairi ini masih memiliki kelemahan mendasar pada tahap *outcome* jangka panjang. Perubahan perilaku siswa diakui belum maksimal dan konsisten karena faktor kelabilan remaja dan lemahnya kontrol sosial lanjutan pascarazia, serupa dengan temuan pendukung dari Suwana dan Lily (2017) mengenai pembatasan efektivitas program akibat faktor kesempatan dan lingkungan.

Berbeda dengan temuan Saputra (2024) serta Ramadhan dan Asriwandari (2025) yang mengkaji komunikasi persuasif Satpol PP dalam konteks penertiban pedagang kaki lima dan usaha informal yang didominasi oleh motif ekonomi tunggal dan pola patroli fisik, penertiban pelajar bolos di Kabupaten Dairi memiliki karakteristik objek yang jauh lebih kompleks karena melibatkan dinamika psikologi remaja dan hak atas pendidikan. Temuan ini menolak relevansi pendekatan represif kaku karena perbedaan karakteristik objek penelitian tersebut. Sebaliknya, temuan ini memperkuat literatur internasional dari Kearney dkk. (2022) dan Pérez-Marco dkk. (2025) yang menegaskan bahwa intervensi ketidakhadiran sekolah paling efektif ketika mengintegrasikan dukungan psikologis sekolah, keterlibatan aktif orang tua, dan pendekatan kognitif-perilaku secara konsisten.

Artinya, penegakan hukum tata pamong di Kabupaten Dairi berhasil menumbuhkan keadilan prosedural yang linier dengan temuan Luthfiyana dkk. (2025) mengenai efektivitas pendekatan edukatif dan layanan bimbingan dalam menekan kenakalan remaja. Adanya program Operasi Kasih Sayang ini secara jangka panjang diharapkan mampu menurunkan angka putus sekolah dan mendorong *re-engagement* peserta didik secara masif, sehingga mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia di daerah secara tidak langsung layaknya hasil penelitian Khadijah dkk. (2016) yang menemukan peran krusial

komunitas dalam memfasilitasi pemenuhan kebutuhan informasi terstruktur demi perbaikan kualitas hidup dan ekonomi jangka panjang.

Berikut adalah beberapa temuan penting terkait komunikasi persuasif Satpol PP berdasarkan komparasi peneliti terdahulu:

a. Penyimpangan Paradigma Operasional: Pendekatan humanis berhasil menarik perhatian (*attention*) siswa dan mereduksi ketegangan psikologis awal di lapangan;

b. Sentuhan Aspek Afektif: Pilihan kata yang menyentuh tanggung jawab moral terhadap orang tua terbukti efektif menumbuhkan minat (*interest*) belajar siswa;

c. Kerapuhan Komitmen Mandiri: Motivasi internal (*desire*) siswa cenderung labil dan rentan mengalami penurunan akibat tekanan teman sebaya (*peer pressure*);

d. Instrumen Pengikat Moral: Kehadiran unsur sekolah dan orang tua saat penandatanganan surat pernyataan memperkuat legalitas keputusan (*decision*) siswa;

e. Ketergantungan Kontrol Sosial: Perubahan tindakan nyata (*action*) yang permanen memerlukan sistem pengawasan berkelanjutan (*continuous monitoring*);

f. Urgensi Transformasi Digital: Sistem pendataan manual pada sekolah seperti SMK Teknik Dairi, SMK N 1 Sidikalang, SMA N 1 Sumbul, dan SMK Sw Rismaduma Sumbul menghambat perumusan kebijakan berbasis data (*evidence-based policy*).

3.7. Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Di luar dimensi utama dari model AIDDA, proses analisis data lapangan berhasil menyingkap beberapa temuan menarik lainnya yang memiliki urgensi tinggi untuk didiskusikan. Temuan menarik pertama adalah adanya kesenjangan (*gap*) kompetensi komunikasi interpersonal yang cukup lebar antarpersonel Satpol PP di lapangan. Diketahui bahwa tidak semua anggota regu operasional memiliki kapasitas yang setara dalam mengartikulasikan pesan persuasif-edukatif secara sabar dan empatik. Personel yang berlatar belakang pendidikan senior atau memiliki jam terbang tinggi cenderung mampu menguasai keadaan dengan tenang, sedangkan personel yang lebih muda atau kurang terlatih terkadang masih terbawa emosi ego sektoral aparat sehingga nada bicara yang keluar cenderung tinggi dan mengarah pada intimidasi verbal. Ketimpangan ini mempertegas kembali argumen mengenai mendesaknya standardisasi perilaku lewat SOP baku.

Temuan menarik kedua berkaitan dengan dimensi keadilan prosedural (*procedural justice*). Berdasarkan pengakuan dari informan siswa yang pernah terjaring, muncul sebuah perspektif kritis di mana mereka merasa proses pembinaan yang selama ini berjalan menempatkan posisi siswa hanya sebagai objek pasif yang diwajibkan mendengarkan ceramah satu arah dan menerima penghakiman kesalahan. Siswa mengungkapkan harapan agar mereka diberikan ruang untuk berpartisipasi aktif dalam proses pengambilan keputusan terkait bentuk pembinaan atau solusi atas permasalahan pribadi yang menyebabkan mereka membolos (seperti masalah keluarga atau kesulitan mengikuti mata

pelajaran tertentu). Ketika siswa dilibatkan dalam merancang solusi atas masalahnya sendiri, mereka merasa lebih dihargai secara kemanusiaan, yang pada gilirannya akan melahirkan rasa tanggung jawab batin yang jauh lebih kuat untuk mengimplementasikan keputusan tersebut dalam kehidupan sehari-hari.

Temuan menarik ketiga menunjukkan bahwa faktor sosiologis lingkungan pergaulan kelompok sebaya (*peer group*) bertindak sebagai variabel antara (*intervening variable*) yang paling dominan dalam membatasi efektivitas jangka panjang dari komunikasi persuasif. Meskipun proses komunikasi AIDDA yang dilakukan Satpol PP telah berhasil mencapai tahapan *decision* dan *action* awal di mana siswa berkomitmen penuh untuk berubah, kekuatan komitmen tersebut kerap kali luluh lantak dalam hitungan minggu akibat tarikan sosiologis dari kelompok bermainnya yang terus memberikan stigma negatif kepada siswa yang berusaha taat, seperti sebutan "penakut" atau "sok alim". Realitas ini mengindikasikan bahwa desain strategi komunikasi persuasif Satpol PP ke depan tidak boleh lagi hanya memosisikan siswa secara individual sebagai target pesan tunggal, melainkan harus mulai merancang metode komunikasi persuasif yang bersifat komunal-kontekstual yang mampu menjangkau dan mengintervensi ekosistem lingkungan pergaulan sosial remaja secara makro di Kabupaten Dairi.

3.5. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Sama halnya dengan temuan penelitian Laila dkk. (2025) di Kabupaten Solok, penelitian ini menemukan bahwa upaya utama yang dijalankan Satpol PP mencakup kerja sama dengan sekolah, pembinaan dan dialog dengan guru serta orang tua, dan penggunaan surat pernyataan sebagai sanksi pembinaan. Hambatan yang ditemukan pun serupa: kurangnya kerja sama orang tua dan minimnya kolaborasi lintas pihak.

Berbeda dengan temuan Saputra (2024) yang mengkaji komunikasi persuasif Satpol PP dalam konteks penertiban PKL di Palembang, penelitian ini menemukan bahwa konteks pelajar bolos memerlukan pendekatan psikologis yang lebih kompleks karena melibatkan dinamika perkembangan remaja, tanggung jawab keluarga, dan hak pendidikan. Kerangka AIDDA yang digunakan penelitian ini memberikan analisis bertahap yang lebih terstruktur dibandingkan penelitian Saputra yang tidak menggunakan kerangka AIDDA.

Temuan ini memperkuat penelitian Kearney dkk. (2022) dan Melvin dkk. (2025) yang menekankan bahwa intervensi ketidakhadiran sekolah paling efektif ketika mengintegrasikan dukungan psikologis sekolah, keterlibatan orang tua, dan pendekatan kognitif-perilaku. Penelitian ini menambahkan dimensi baru berupa urgensi digitalisasi sistem pendataan dan SOP komunikasi persuasif sebagai instrumen akuntabilitas yang belum dikaji dalam penelitian terdahulu.

Temuan menarik lainnya adalah adanya kesenjangan antara pemahaman awal (output) dan perubahan perilaku berkelanjutan (outcome). Meski siswa menunjukkan kesadaran dan niat untuk berubah saat razia, tanpa monitoring dan tindak lanjut yang terstruktur, motivasi tersebut cenderung melemah seiring waktu. Hal ini konsisten dengan temuan Baskerville (2022) yang menegaskan bahwa re-engagement siswa membutuhkan dukungan terus-menerus, bukan hanya intervensi sesaat.

3.6. Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Di luar dimensi utama dari model AIDDA, proses analisis data lapangan berhasil menyingkap beberapa temuan menarik lainnya yang memiliki urgensi tinggi untuk didiskusikan. Temuan menarik pertama adalah adanya kesenjangan (*gap*) kompetensi komunikasi interpersonal yang cukup lebar antarpersonel Satpol PP di lapangan. Diketahui bahwa tidak semua anggota regu operasional memiliki kapasitas yang setara dalam mengartikulasikan pesan persuasif-edukatif secara sabar dan empatik. Personel yang berlatar belakang pendidikan senior atau memiliki jam terbang tinggi cenderung mampu menguasai keadaan dengan tenang, sedangkan personel yang lebih muda atau kurang terlatih terkadang masih terbawa emosi ego sektoral aparat sehingga nada bicara yang keluar cenderung tinggi dan mengarah pada intimidasi verbal. Ketimpangan ini mempertegas kembali argumen mengenai mendesaknya standardisasi perilaku lewat SOP baku.

Temuan menarik kedua berkaitan dengan dimensi keadilan prosedural (*procedural justice*). Berdasarkan pengakuan dari informan siswa yang pernah terjaring, muncul sebuah perspektif kritis di mana mereka merasa proses pembinaan yang selama ini berjalan menempatkan posisi siswa hanya sebagai objek pasif yang diwajibkan mendengarkan ceramah satu arah dan menerima penghakiman kesalahan. Siswa mengungkapkan harapan agar mereka diberikan ruang untuk berpartisipasi aktif dalam proses pengambilan keputusan terkait bentuk pembinaan atau solusi atas permasalahan pribadi yang menyebabkan mereka membolos (seperti masalah keluarga atau kesulitan mengikuti mata pelajaran tertentu). Ketika siswa dilibatkan dalam merancang solusi atas masalahnya sendiri, mereka merasa lebih dihargai secara kemanusiaan, yang pada gilirannya akan melahirkan rasa tanggung jawab batin yang jauh lebih kuat untuk mengimplementasikan keputusan tersebut dalam kehidupan sehari-hari.

Temuan menarik ketiga menunjukkan bahwa faktor sosiologis lingkungan pergaulan kelompok sebaya (*peer group*) bertindak sebagai variabel antara (*intervening variable*) yang paling dominan dalam membatasi efektivitas jangka panjang dari komunikasi persuasif. Meskipun proses komunikasi AIDDA yang dilakukan Satpol PP telah berhasil mencapai tahapan *decision* dan *action* awal di mana siswa berkomitmen penuh untuk berubah, kekuatan komitmen tersebut kerap kali luluh lantak dalam hitungan minggu akibat tarikan sosiologis dari kelompok bermainnya yang terus memberikan stigma negatif kepada siswa yang berusaha taat, seperti sebutan "penakut" atau "sok alim". Realitas ini mengindikasikan bahwa desain strategi komunikasi persuasif Satpol PP ke depan tidak boleh lagi hanya memosisikan siswa secara individual sebagai target pesan tunggal, melainkan harus mulai merancang metode komunikasi persuasif yang bersifat komunal-kontekstual yang mampu menjangkau dan mengintervensi ekosistem lingkungan pergaulan sosial remaja secara makro di Kabupaten Dairi.

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa komunikasi persuasif Satpol PP Kabupaten Dairi dalam razia pelajar bolos telah berjalan dengan cukup baik pada tahap *attention* dan *interest*, namun belum sepenuhnya optimal pada tahap *desire, decision,* dan *action* dalam mendorong perubahan perilaku yang berkelanjutan. Partisipasi dan kolaborasi yang terjalin

antara Satpol PP, sekolah, dan orang tua berhasil membangun pemahaman awal siswa, namun perubahan jangka panjang masih terhambat oleh keterbatasan sistem monitoring terstruktur pascarazia dan administrasi pendataan yang manual. Perihal integrasi kerangka AIDDA dengan prinsip perlindungan anak dalam penertiban ini menambahkan temuan baru yang memperluas literatur pada bidang komunikasi tata pamong dan pelayanan publik daerah.

Guna meningkatkan keberlanjutan pendekatan persuasif, disarankan bagi Satpol PP Kabupaten Dairi untuk menyusun SOP komunikasi humanis yang baku dan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi melalui transformasi digitalisasi sistem pendataan siswa bolos berbasis aplikasi *mobile* dan *database* terpusat. Pemerintah daerah beserta jajaran satuan pendidikan juga seyogianya membangun kemitraan proaktif yang intensif demi memastikan mekanisme pemantauan pascarazia berjalan secara *real-time* dan berkesinambungan.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan pada jumlah informan siswa yang terjaring razia dan cakupan sekolah yang diteliti, mengingat sebaran geografis Kabupaten Dairi yang cukup luas. Data perubahan kehadiran jangka panjang juga tidak dapat dikumpulkan secara optimal akibat keterbatasan sistem pendataan manual di Satpol PP.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Peneliti menyarankan agar dilakukan penelitian lanjutan dengan pendekatan mixed methods untuk mengukur secara lebih spesifik tingkat efektivitas komunikasi persuasif dan faktor-faktor yang memengaruhinya secara statistik. Penelitian komparatif antar daerah juga penting untuk mengidentifikasi best practices komunikasi persuasif Satpol PP dalam penertiban pelajar bolos.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih ditujukan kepada Dr. Wiredarme, S.Pd., MH selaku dosen pembimbing yang telah membimbing, mengarahkan, dan memberikan petunjuk dalam penyusunan skripsi ini. Terima kasih pula kepada Kepala Satpol PP Kabupaten Dairi beserta seluruh jajaran yang telah memberikan izin penelitian dan menjadi narasumber. Kepada Kepala Sekolah, Guru BK, orang tua, dan siswa yang bersedia menjadi informan, peneliti menyampaikan penghargaan yang sebesar-besarnya atas keterbukaan dan dukungannya dalam penelitian ini.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Amaliyah, A., Hamzah, H., & Farial, F. (2018). Layanan Konseling Kelompok Dengan Teknik Self Management Untuk Mengurangi Perilaku Siswa Membolos Di Smpn 29 Banjarmasin Tahun Ajaran 2017/2018. *Jurnal Mahasiswa Bk An-Nur : Berbeda, Bermakna, Mulia*, *4*(1). https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/AN-NUR/article/view/1320

Breves, P. (2023). Persuasive communication and spatial presence: a systematic literature review and conceptual model. *Annals of the International Communication Association*, *47*(2). https://doi.org/10.1080/23808985.2023.2169952

Chakravarty, R., & Sarma, N. N. (2022). Evolutionary framework of hierarchy of effects models: exploring relevance in the shifting of customer path. *Vilakshan - XIMB Journal of Management*, *19*(1). https://doi.org/10.1108/xjm-09-2020-0151

Kansil, D., & Hein Pusung, P. (2021). Pola Pembinaan Integritas Aparatur Sipil Negara Pada Pemerintahan Daerah Kabupaten Sitaro Sulawesi Utara. *Jurnal Syntax Transformation*, *2*(12). https://doi.org/10.46799/jst.v2i12.470

Kearney, C. A., Benoit, L., Gonzálvez, C., & Keppens, G. (2022). School attendance and school absenteeism: A primer for the past, present, and theory of change for the future. In *Frontiers in Education* (Vol. 7). https://doi.org/10.3389/feduc.2022.1044608

Luthfiyana, S., Juita, R., Sitompul, S. R., Bunga Dinda Permata, & Delmira Syafrini. (2025). Pendekatan Edukatif dan Sosial dalam Mencegah Tawuran di Kalangan Remaja Kota Padang. *Social Empirical*, *2*(1). https://doi.org/10.24036/scemp.v2i1.85

Macora, N. A. D., Polyando, P., & Hutasoit, I. (2024). Implementasi Kebijakan Program Pemberdayaan Usaha Kerajinan Noken Mama Papua Di Distrik Wania, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah. *Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics*, *10*(1). https://doi.org/10.25299/jkp.2024.vol10(1).15803

Mariani, M., Peluso, P., Charles, N., Song, J., & Yoon, H. (2025). Improving School Counselor Ratios: School Counseling Support for English Learner Students. *Professional School Counseling*, *29*(1). https://doi.org/10.1177/2156759x251407645

Pérez-Marco, M., Gonzálvez, C., Fuster, A., & Vicent, M. (2025). A systematic review of intervention programs for school attendance problems. *Children and Youth Services Review*, *169*. https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2024.108091

Petty, R. E., Priester, J. R., & Briñol, P. (2002). Mass Media Attitude Change: Implications of the Elaboration Likelihood Model of Persuasion. *Media Effects Advances in Theory and Research*, (JANUARY).

Putri, N. R., Wakih, A. A., & Sidik, G. S. (2025). Strategi Guru Dalam Mengatasi Kenakalan Siswa Kelas Iii Di SDN 3 Sukasari Kota Tasikmalaya. *CaXra: Jurnal Pendidikan Sekolah Dasar*, *5*(1). https://doi.org/10.31980/caxra.v5i1.2837

Rayani, D., Gunawan, I. M., & Erdiansyah, F. (2021). PENGARUH TEKNIK KONSELING BEHAVIORAL TERHADAP PERILAKU MEMBOLOS SISWA KELAS X SMK NURUL ISLAM SEKARBELA. *Realita : Jurnal Bimbingan Dan Konseling*, *6*(1). https://doi.org/10.33394/realita.v6i1.4080

Simangunsong, F., & Hutasoit, I. (2018). A study of the development of natuna regency as a key site on Indonesia's outer border with particular regard to national defense and security issues in the South China Sea. *Journal of Marine and Island Cultures*, *7*(2). https://doi.org/10.21463/jmic.2018.07.2.04